

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia memiliki potensi pasar yang cukup besar dilihat dari sisi input tenaga kerja. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi penggerak perekonomian dari sisi penawaran. Namun kenyataannya yang dihadapi hingga saat ini, jumlah penduduk dan tenaga kerja yang besar tidak menjadi aset potensial yang dapat dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi melainkan secara tidak langsung menjadi beban negara dalam pembangunan. Salah satu masalah yang cukup serius dihadapi Indonesia adalah masalah pengangguran.

Proses pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat, dalam mencapai suatu kesejahteraan salah satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang mendukung dan adanya pemerataan pendapatan di masyarakat, di Indonesia antara kesempatan kerja yang ada dengan angkatan kerja terjadi kesenjangan yaitu peningkatan jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja yang meningkat lebih cepat, hal ini akan berdampak pada terciptanya pengangguran. Pengangguran yang terjadi akan memiliki dampak terhadap kehidupan sosial yaitu tingkat kriminal dan kekerasan, hal ini akan berpengaruh pada stabilitas dan pembangunan ekonomi akan terhambat serta kesejahteraan akan berkurang.



Pengangguran merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Jumlah penganggur dan setengah penganggur mengalami peningkatan. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Hal ini membawa berbagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran untuk memenuhi permintaan hidup masyarakat seperti sandang, pangan, prasarana kesehatan, pendidikan dan juga dalam hal penediaan lapangan kerja, sehingga dituntut perananan pemerintah daerah dan masyarakat yang lebih besar.

Secara ekonomis, upaya menurunkan jumlah pengangguran terbuka melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masih belum mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Di samping kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih terbatas, kemampuan menciptakan lapangan kerja relatif kecil dan terdapat kecenderungan mengalami penurunan. Teori keynes dalam Todaro (2006:102) mengatakan bahwa cara mengurangi pengangguran yaitu dengan memperbanyak investasi. Misalnya mesin, karena mesin membutuhkan operator sehingga secara langsung ataupun tidak akan menyerap tenaga kerja.



Selain itu, konsumsi harus sama dengan pendapatan, karena banyaknya tingkat konsumsi akan memerlukan banyak output sehingga otomatis harus menambah pekerja, apabila outputnya banyak maka gaji para pegawai akan naik sehingga daya beli mereka meningkat. Secara teoritis, semakin tinggi investasi yang ditanamkan pada suatu perusahaan, maka kepastian perusahaan untuk menyerap tenaga kerja akan semakin besar, dan jika tenaga kerja bisa terserap, maka pendapatan juga akan meningkat dan secara otomatis juga akan mempengaruhi konsumsi masyarakat, semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsinya.

Menurut Alghofari (2010:8) adapun indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi jumlah pengangguran antara lain tingkat inflasi, besaran upah yang berlaku, investasi, jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Masalah inflasi sangat erat kaitannya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja. Dengan naiknya harga-harga di semua sektor, maka perusahaan-perusahaan akan mengambil kebijakan mengurangi biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan cara mengurangi pegawai atau tenaga kerja. Akibatnya, angka pengangguran yang tinggi tidak dapat dihindari.

Permasalahan utama selanjutnya dan mendasar dalam ketenagakerjaan adalah masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran. Hal tersebut disebabkan karena pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya.



Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Penetapan upah minimum pada suatu daerah akan berdampak pada pekerja, upah minimum akan meningkatkan upah mereka di atas tingkat keseimbangannya. Kenaikan upah minimum bagi pekerja akan memperbaiki daya beli mereka yang akhirnya akan mendorong gairah bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tapi, bagi pengusaha yang menganggap upah merupakan biaya, kenaikan ini menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan kepada pekerja dengan tingkat upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya kenaikan upah minimum ini, pengusaha cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan dalam proses produksi. Hal ini akan memperbanyak jumlah pengangguran di tanah air.

Dilihat dari sisi investasi yang akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dan dilihat dari sisi jumlah penduduk yang semakin meningkat akan berdampak pada peningkatan jumlah angkatan kerja sehingga apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, maka hal ini akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran.



Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Indikator-indikator ekonomi tersebut juga berlaku di Provinsi Jambi seperti pada tabel 1.1. dibawah ini merupakan pertumbuhan ekonomi, tingkat upah dan inflasi yang diduga berpengaruh terhadap pengangguran terbuka Provinsi Jambi tahun 2009-2018.

Tabel 1.1.

Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah Minimum, Inflasi dan Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi Tahun 2009-2018



Tahun	Pertumbuhan Ekonomi PDRE ADHK (%)	Upah Minimum (Rp)	Inflasi (%)	Pengangguran Terbuka (%)
2009	6,39	800.000	2,90	5,54
2010	7,35	900.000	2,40	5,39
2011	8,54	1.018.000	2,76	4,02
2012	5,03	1.142.500	3,22	3,22
2013	7,17	1.300.000	4,50	4,84
2014	7,16	1.502.230	2,89	5,08
2015	4,21	1.710.000	1,37	4,34
2016	4,37	1.906.650	4,51	4,00
2017	4,64	2.063.948	2,68	3,87
2018	4,69	2.243.718	3,02	3,87

Sumber : BPS Provinsi Jambi Tahun 2021.

Dari tabel 1.1. di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari tahun 2009-2018 secara rata-rata mengalami fluktuasi setiap tahun. Mulai dari 6,39% tahun 2009 naik menjadi 7,35% tahun 2010 sampai tahun 2018 turun menjadi 4,69%. Sedangkan pada tingkat upah dapat dilihat bahwa tingkat upah minimum regional di Provinsi Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan setiap tahun mulai dari Rp. 800.000 pada tahun 2009 menjadi Rp. 2.243.718 pada tahun 2018. Inflasi yang terjadi selama tahun 2009-2018 juga menunjukkan penurunan yang berfluktuasi dari angka 2,90% tahun 2009 turun menjadi 2,40% tahun 2010. Kemudian turun pada angka 2,90% tahun 2009 hingga tahun 2015 dapat turun mencapai angka 1,37% dan pada tahun 2018 naik kembali menjadi 3,02%. Pada pengangguran terbuka mengalami fluktuasi yang cenderung menurun setiap tahun mulai dari 5,54% tahun 2009 turun menjadi 5,39% tahun 2010 dan pada tahun 2018 turun menjadi 3,86%.

Dari fenomena tersebut, pengangguran pada berbagai dimensinya menjadi satu beban pada perekonomian. Dampak pada perekonomian Provinsi Jambi dan kehidupan sosial masyarakat dikhawatirkan juga akan muncul sejalan tingginya pertumbuhan angka pengangguran tersebut. Namun dengan pertumbuhan pencari kerja yang masih tinggi serta tekanan ekonomi yang makin berat di Provinsi Jambi ternyata penciptaan lapangan kerja baru belum cukup untuk bisa menyelesaikan permasalahan pertumbuhan pengangguran. Permasalahan pengangguran ini jika tidak ada tindak lanjut akan mempengaruhi perekonomian yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.



Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi Tahun 2009-2018”**.

1.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi Tahun 2009-2018 secara parsial dan simultan?
2. Berapa besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi Tahun 2009-2018 secara parsial dan simultan?

1.2.2. Batasan Masalah

Dalam penelitian **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi Tahun 2009-2018** peneliti membatasi variabel penelitian yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu serta kemampuan penulis dalam menganalisis variabel-variabel tersebut.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi Tahun 2009-2018 secara parsial dan simultan
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan inflasi terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Jambi Tahun 2009-2018 secara parsial dan simultan

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademis

Bagi penulis, berharap dari penelitian ini akan mampu menambah wawasan serta lebih mengerti dan memahami teori-teori yang didapat selama proses perkuliahan dimana berhubungan dengan ilmu ekonomi yaitu upah minimum pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam ilmu ekonomi.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.



- c. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan agar lebih peduli dengan masalah pengangguran di Provinsi Jambi dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan.



